

### **BAB III**

## **PROSES PERSETUJUAN *JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION***

Bab ini membahas proses persetujuan *Joint Comprehensive Plan of Action*, yang didalam proses pembuatan kesepakatan ini terdapat kelompok-kelompok yang menolak disetujuinya *Joint Comprehensive Plan of Action*. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai *Bargaining* kelompok P5+1 dalam *Joint Comprehensive Plan of Action*. Kemudian bab ini akan diakhiri dengan pembahasan mengenai garis besar isi *Joint Comprehensive Plan of Action*.

### **A. Kelompok yang menolak Amerika Serikat menyetujui *Joint Comprehensive Plan of Action***

#### **1. Kelompok Neo-Konservatif**

Gerakan Konservatif Baru (*Neo-Conservatism*) atau biasa disingkat sebagai *Neocons* merupakan sebuah gerakan politik yang lahir pada tahun 1960an. Kebanyakan mayoritas pengikut gerakan ini berasal dari Partai Republik. Pengaruh dan keterlibatan gerakan ini terhadap dinamika politik Amerika Serikat tidak hanya terbatas pada isu-isu domestik, melainkan juga pada pengambilan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat. Dalam isu-isu kontemporer hubungan internasional, perdebatan mengenai pengaruh pemikiran Neocons dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat semakin jelas terlihat khususnya pasca peristiwa terorisme 9/11 dan Invasi Amerika Serikat ke Irak sampai kepada permasalahan kepemilikan program nuklir Iran yang akan berdampak pada hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah.

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat era pemerintahan George W. Bush bahkan dapat dikatakan didorong oleh pengaruh kuat gerakan Neocons, hal ini di

dukung dengan keterlibatan beberapa tokoh yang memiliki keterkaitan erat sebagai pembela pemikiran dan perkembangan gerakan *Neocons*. Untuk itu, penelusuran keterlibatan gerakan Neocons dalam Kebijakan Luar Negeri AS, khususnya dalam pemerintahan George W. Bush, menjadi fokus yang perlu untuk diperhatikan mengingat bahwa beberapa jejak pemikiran (*Legacy*) dari gerakan Neocons masih akan terus berlanjut dalam pengambilan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di masa depan. Terlebih lagi, situasi dalam politik dan hubungan internasional saat ini memiliki kecenderungan yang berbeda dalam melihat posisi dan pengaruh kekuatan Amerika Serikat terhadap dunia. Agenda utama Neo-Konservatisme mengenai 'penyebarluasan demokrasi' dan 'supremasi militer' dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat yang bertumpu pada obligasi moral memang telah dilaksanakan di Afganistan serta Irak sejak 2003 (Yohanes, 2017).

Meskipun beberapa kelompok Neo-Konservatisme menolak langsung pengaruh mereka, namun mereka menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk lebih mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat. Agenda untuk tetap menjaga Amerika Serikat sebagai pembentuk rezim yang stabil dalam struktur internasional 'unipolar' merupakan agenda yang ingin terus dikejar oleh para *Neocons*. Meskipun dalam penelusuran sejarah memang gerakan Neocons seakan terus mengalami evolusi, namun penekanan nilai-nilai yang kuno masih tetap menjadi pijakan utama para Neo-Konservatis untuk merumuskan bagaimana Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat seharusnya diambil: Amerika Serikat harus menjadi kekuatan utama di dunia, khususnya pasca Perang Dingin meskipun situasi lingkungan strategis di berbagai kawasan di dunia mengalami perubahan yang sangat signifikan (Yohanes, 2017).

Amerika menjadi terlalu 'lunak dan lemah' untuk melawan musuh tanpa ideologis dan kejam. Namun demikian, tidak ada kontradiksi antara mengakui bahwa musuh-musuh

kita tidak secara intrinsik jahat, dan menyadari bahwa mereka harus diperangi, sama seperti tidak ada kontradiksi antara mengakui bahwa walaupun kita tidak secara intrinsik baik, kita masih harus melawan mereka. Begitu pula tujuan moral kebijakan luar negeri, Truman menegaskan, akan didasarkan pada kerendahan hati, bukan keangkuhan. Tidak peduli seberapa besar kekuatan kita, kita harus menyangkal diri kita bahwa lisensi itu bergantung kepada aktornya. Lebih jauh lagi, dia menyadari bahwa internasionalisme yang kuat menuntut perhatian lebih besar untuk menyelesaikan ketegangan domestik (Fukuyama, 2006).

Pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat yang awalnya di pimpin oleh George W. Bush yang berasal dari partai Republik yang merupakan kelompok neo-konservatif. Bush menyelesaikan permasalahan nuklir Iran menggunakan *hard power* dan jalur militeristik karena dikhawatirkan Nuklir Iran akan mengganggu kedaulatan maupun kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. George W. Bush di masa pemerintahannya tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan Amerika Serikat dengan Iran dengan sedikit membuka hubungan diplomatik, sebaliknya Bush mengancam akan mengirimkan pasukan militernya jika Iran tidak mau patuh menghentikan program pengayaan uraniumnya. Dengan cara yang seperti ini tentunya tidak memberikan hasil yang baik bagi Amerika Serikat, dan membuat program nuklir Iran terus berlanjut.

Banyak para pemimpin ataupun orang-orang berpengaruh di Amerika Serikat yang berasal dari kelompok Neo-Konservatif mempengaruhi pemerintahan maupun kebijakan domestik dan luar negeri Amerika. Barack Obama yang bukan berasal dari kelompok Neo-Konservatif melainkan berasal dari partai Demokrat berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara diplomasi, mengedepankan demokrasi, hak asasi manusia, juga ekonomi liberal dan menyebarkan konsep ekonomi liberal dan memberikan bantuan finansial bagi negara yang membutuhkan

pinjaman ataupun pemberian dana akibat krisis yang melanda suatu negara (Joseph S, 2002, hal. 138).

Tidak hanya itu, cara *soft power* Obama yang sangat berperan dalam pembuatan kebijakan Amerika ini tentunya sangat bertolak belakang dengan kepemimpinan sebelumnya. Meskipun pada hakikatnya *Hard Power* atau *Soft Power* dibutuhkan bagi pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Obama yang menyetujui *Joint Comprehensive Plan of Action* banyak ditentang oleh para golongan Neo-Konservatif yang tidak setuju dengan cara ini dan menganggap dengan disetujuinya perjanjian ini akan merugikan Amerika Serikat dan membayakan kedaulatan negara maupun aliansinya Israel.

Kelompok Neo-Konservatif yang unilateralisme (sikap melakukan tindakan sepihak tanpa memperdulikan kedaulatan negara lain) sangat jauh berbeda dengan multilateralisme yang dimiliki para pemimpin yang berasal dari Partai Demokrat yakni Obama. Sikap unilateralisme Amerika Serikat semakin terlihat pasca tragedi 9/11. Tragedi ini sekaligus memalukan Amerika Serikat yang dalam sejarahnya tidak pernah terkena dampak buruk oleh serangan-serangan dari luar. Pasca tragedi ini, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Bush semakin menunjukkan kapabilitasnya sebagai negara adidaya. Jinsa Online melaporkan bahwa Presiden Bush mengeluarkan doktrinya yang dikenal dengan sebutan “Doktrin Bush” yang pertama kali dikeluarkan pada 1 Juni 2002 dihadapan wisudawan Akademi militer AS West Point (Anwar, 2003). Isi doktrin tersebut adalah:

*We cannot defend America and our friends by hoping for the best. We cannot put our faiths in the word of tyrants who solemnly sign non-proliferation treaties and then systematically break them. If we wait*

*for threats to fully materialize we will have waited too long.*

Kita tidak dapat mempertahankan Amerika dan sekutu kita dengan berharap yang terbaik. Kita tidak dapat menaruh kepercayaan kepada negara pembangkang yang menandatangani perjanjian pelarangan penyebaran senjata nuklir yang kemudian mereka melanggar. Jika kita menunggu ancaman sampai terjadi maka kita akan menunggu terlalu lama.

Selain itu, juga menambahkan Doktrin perkataan Bush selebihnya yaitu:

*The war on terror will not be won on the defensive. We must take the battle to the enemy, disrupt his plans and confront the worst threats before they emerge. A military that must be ready to strike at a moment's notice in any dark corner of the world.*

Perang melawan terorisme tidak akan dimenangkan dengan cara bertahan. Kita harus mengambil langkah perang, mengganggu rencana mereka dan mengkonfrontasi sebelum ancaman terburuk terjadi. Militer harus siap untuk menyerang sekalipun di ujung dunia.

Pandangan inilah yang merupakan kelanjutan dari Doktrin Pre-emptive strike (melakukan penyerangan terhadap musuh sebelum musuh melakukan ancaman dan mengambil tindakan lebih). Doktrin Pre-emptive strike tersebut merupakan doktrin yang diusung oleh Presiden Bush beserta tokoh-tokoh Neo-konservatif Amerika Serikat yang berpandangan unilateralisme. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya Wakil Presiden Dick Cheney, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, Richard Perle sebagai Kepala Dewan Kebijakan Pertahanan, dan Paul Wolfowitz sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Hamzah & Kazhim, 2007, hal. 126). Oleh sebab itu, bentuk formulasi kebijakan luar negeri AS tidak

terlepas dari peran tokoh Neo-konservatif Amerika Serikat tersebut yang disebut dengan *invisible government* (Hendrajit, 2010, hal. 99).

Selain pengaruh Neo Konservatif, dalam mengambil kebijakan berikut adalah stake holder yang mempunyai andil dalam mengambil keputusan luar negeri Amerika Serikat; Presiden, Kongres, Central Intelligence Agency (CIA), Kelompok kepentingan yang didalamnya ada human rights watch, amnesty internasional, rotary international, the zionist organization. The roman catholic church, the brookings institution, serta kelompok-kelompok etnis dan Cina, Jepang, Polandia, Perancis, dan lain-lain. Dua kelompok kepentingan terkemuka adalah Lobi Yahudi dan Lobi Tiongkok. Bila Lobi Tiongkok selalu mengusahakan agar memasukan unsur komunis komunis, maka Lobi Yahudi selalu menekan pemerintah Amerika Serikat agar menjalankan politik luar negeri yang menguntungkan Israel (Cipto, 2003, hal. 207-208).

Di masa pemerintahan Barack Obama, penasehat khusus di Dewan Keamanan bidang Hak Asasi Manusia juga merupakan orang yang berasal dari kelompok Neo-Konservatif. Yang menyebabkan keputusan yang dihasilkan tersebut dipertimbangkan secara matang agar kepentingan Amerika Serikat dapat terpenuhi. Kesepakatan JCPOA akan diterapkan setelah mengatasi hambatan-hambatan di Washington dan juga Teheran. Pihak konservatif di kedua ibukota tersebut telah menentang kompromi yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan tersebut. Hambatan terbesar adalah Kongres Amerika Serikat, di mana partai Republik mempunyai suara mayoritas dan diperkirakan akan memilih menentang kesepakatan tersebut setelah periode peninjauan hingga 60 hari. Presiden Barack Obama diperkirakan akan memveto suara negatif. Pada akhirnya meskipun banyak golongan Neo-Konservatif yang bersikeras menolak dan tidak menginginkan Amerika Serikat menyetujui JCPOA, pada akhirnya Barack Obama selaku kepala pemerintahan dapat

membulatkan suara untuk mengambil keputusan yang dapat menguntungkan banyak pihak.

## **2. Israel**

Kawasan Timur Tengah adalah kawasan yang selalu rawan dengan konflik. Israel sebagai satu-satunya negara non Islam di kawasan itu selalu merasa terancam bila ada negara lain yang memiliki kekuatan militer cukup besar, termasuk bila mempunyai potensi kekuatan nuklir. Iran sebagai negara yang sudah membangun teknologi nuklir sejak lama kemudian menjadi ancaman nyata bagi Israel yang kemudian berhasil mengajak Amerika Serikat untuk menekan Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan pengaruhnya di politik internasional untuk bisa memberikan sanksi kepada Iran melalui PBB (Akbar & Kodimerinda, 2017).

Sejak jatuhnya Dinasti Shah Iran tahun 1979, Sekutu Amerika Serikat, Israel tidak henti-hentinya memprovokasi masyarakat dunia bahwa Republik Islam Iran tidak hanya merupakan ancaman atas umat Yahudi, tetapi juga umat manusia. Israel juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan hubungan tegang Iran-Amerika Serikat, khususnya disebabkan Israel merasa sangat cemas akan pembangunan kekuatan nuklir Iran. Bahkan Israel dan Amerika Serikat konon telah sepakat membina koordinasi bilateral mengikuti dan menghadapi program pengembangan nuklir Iran. Kedua negara tersebut sering pula mengadakan latihan militer bersama untuk memenuhi tuntutan sewaktu-waktu diputuskan menggunakan cara militer (Rahman M. , 2003)

Meskipun tidak sedikit negara yang menentang program pengembangan nuklir Iran, namun tidak sedikit pula yang memberi dukungan kepada Iran terkait haknya yang dijamin oleh NPT tersebut. Dukungan secara langsung datang dari berbagai negara baik dari Eropa, Timur Tengah, Asia, dan Amerika Latin. Negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk

(*Gulf Cooperation Council/GCC*) yang beranggotakan enam negara juga memberi kepercayaan kepada Iran dan bahkan beberapa negara menandatangani perjanjian kerja sama keamanan dengan Iran. Sekretaris Jenderal Liga Arab, Amr Musa, juga mengutuk kemunafikan Barat dengan menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir dan menutup mata atas senjata pemusnah massal Israel (AFX News, 2003)

Israel merupakan salah satunya negara yang berada di kawasan Timur Tengah dengan permasalahannya sendiri terhadap negara Iran. Hubungan antara pemerintahan Iran dengan Israel merupakan salah satu hal yang pelik di Timur Tengah. Setelah berdirinya Israel pada 1948 hingga revolusi Iran pada 1979 ketika dinasti Pahlevi terguling, Israel masih memiliki hubungan baik dengan Iran. Iran dan Israel dianggap memiliki posisi penting dalam memenuhi kebutuhan minyak serta transfer minyak ke pasar Eropa. Namun setelah terjadi revolusi Islam Iran, Iran dan Israel telah menutup jalan aliansi politik antara kedua negara selama Era dinasti Pahlevi menjadi permusuhan seiring kekuatan Ayatollah Khomeini berkuasa. Saat ini kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik satu sama lain, sebab Iran menarik pengakuan atas Israel.

Pada kasus hubungannya terhadap Palestina, hubungan Iran dan Israel semakin tahun semakin memburuk, hal ini dikarenakan Iran yang telah lama menjalin kerjasama diplomatik dan ekonomi bersama Palestina ikut andil dalam membantu Palestina atas konflik perang yang terjadi di Jalur Gaza melawan Israel. Melalui presiden Ahmadinejad, Iran mengklaim sebagai negara yang paling menentang pendudukan Israel atas Palestina dan berupaya agar Israel membebaskan Palestina. Hal ini terlihat jelas pada pidato Ahmadinejad saat meresmikan kongres IX para menteri luar negeri Asia, peresmian tersebut dihadiri oleh menteri luar negeri Irak, Mesir dan Bahrain, Ahmadinejad mengatakan bahwa negara – negara dunia harus bersatu melawan Israel, seperti yang dilansir kantor berita Iran,



Ahmadinejad mengatakan bahwa tantangan yang harus dihadapi oleh negara-negara Islam adalah ancaman dan pendudukan pola pikir terhadap rezim Zionis Israel sebagai pangkal dari semua permasalahan bangsa muslim dunia guna memperluas hegemoni nya di Timur Tengah Amerika Serikat pun berusaha untuk melakukan kerjasama terhadap negara-negara yang berada di kawasan ini. Salah satu nya ialah Israel yang merupakan mitra lama kerjasama Amerika Serikat. Sejak jaman kepresidenan Truman, Amerika Serikat telah terlihat memihak kepada pemerintahan Israel dengan ikut andil dalam proses pendirian negara tersebut dan bentuk kerjasama tersebut masih terus berkembang hingga saat ini.

Pada tahun 2006 sendiri pada pertemuan dewan PBB, Duta Israel untuk PBB pernah menyatakan bahwa Iran, Suriah, dan Hamas merupakan poros utam terror (*axis of terror*) dunia berkaitan dengan program nuklirnya. Kekhawatiran Israel terhadap pencapaian program nuklir Iran yang disebut dapat mencapai pembuatan senjata nuklir memberikan sinyal kepada *American-Israel Public Affairs Community* (AIPAC) agar segera memberikan lobi terhadap pemerintahan Amerika Serikat untuk terus memantau dan memberikan sanksi yang tegas bagi Iran. AIPAC sendiri ialah merupakan kelompok kepentingan Israel di Amerika Serikat yang didirikan oleh Isaiah Leo Si Kenen pada tahun 1951 masa pemerintahan Eissenhower dan memiliki kurang lebih 100.000 anggota yang tersebar luas di Amerika Serikat saat ini (Windham, 2010)

Salah satu kepentingan AIPAC ialah menghentikan pengembangan program nuklir Iran karena AIPAC merasa bahwa program pengembangan nuklir Iran akan menjadi ancaman bersama negara-negara di kawasan Timur Tengah terutama bagi Israel yang merasa bahwa teknologi nuklir Iran akan digunakan untuk menyerang Israel. Kepentingan AIPAC tidak lepas dari upaya untuk memperjuangkan kepentingan- kepentingan Israel di kawasan Timur Tengah. Israel terus menendesak pihak Amerika untuk dapat terus

menekan Iran dengan tetap memberikan sanksi atau embargo agar Iran tidak dapat mengembangkan teknologi nuklirnya. Namun pada perkembangannya sanksi ekonomi yang telah diberikan telah dihentikan, IAEA telah memastikan penggunaan nuklir yang hanya sesuai untuk pengolahan sumber daya energi (Yoshitomo, 2017).

Amerika Serikat dan sekutunya tetap berupaya untuk menghentikan program pengembangan nuklir Iran. Alasan lain penghentian nuklir Iran yang diinginkan oleh Amerika Serikat adalah perlindungan terhadap Israel yang juga menjadi alasan mengapa Amerika Serikat merespon pengembangan nuklir Iran. Amerika Serikat meyakini bahwa nuklir Iran berpotensi mengancam kedaulatan Israel di Timur Tengah.

### **B. Bargaining Kelompok P5+1 dalam *Joint Comprehensive Plan of Action***

Iran sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan minyak yang besar sangat “diperhatikan” oleh negara-negara barat dan program nuklir Iran juga memiliki daya tarik yang luar biasa dalam bidang keamanan maupun sebagai energi alternatif yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sebagai pengganti energi fosil yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi. Amerika Serikat, Perancis, China, Rusia, Inggris, serta Jerman (P5+1) sebagai negara yang memiliki *power* tinggi di dunia sangat mengetahui potensi yang ada dan berusaha melebarkan dominasi kekuatan di negara tersebut. Sebelumnya dibawah pemerintahan Ahmadinejad, Iran dikenakan sanksi oleh DK-PBB.

Kepentingan Amerika terhadap nuklir Iran juga didasarkan faktor kekhawatiran ancaman internasional di kawasan Timur Tengah. Kekhawatiran itu sebenarnya hanya suatu alasan bagi Amerika untuk memperluas hegemoni kekuatannya di kawasan tersebut dikarenakan Timur Tengah merupakan kawasan yang memiliki sumber minyak yang melimpah sehingga ketergantungan akan impor minyak,

maka dari itu Amerika bersikeras ikut campur dalam persoalan nuklir Iran dikarenakan ketika Iran sudah tidak lagi mengembangkan program nuklirnya maka Amerika dengan bantuan Israel akan mudah menguasai suplai utama minyak tersebut. Amerika juga berkepentingan untuk dan menjaga Israel sebagai sekutunya dari ancaman keamanan global.

Sementara Inggris, Perancis, dan Jerman yang tergabung dalam Uni Eropa dengan beberapa negara Eropa lainnya memberlakukan pelarangan impor minyak mentah yang diproduksi Iran. Adapun larangan lainnya bagi Iran adalah penggunaan senjata berat, perdagangan senjata, dan pembekuan aset perusahaan mulai tahun 2012. Masalahnya adalah ketiga negara yang memutuskan perdagangan juga sedang mengalami krisis ekonomi. Arab Saudi yang diharapkan dapat menjadi pemasok utama minyak, menggantikan posisi Iran. Namun Arab Saudi memiliki keterbatasan pasokan minyak dan tentunya ketiga negara tersebut berpikir ulang kembali mengenai hubungan diplomatiknya dengan Iran.

Sedangkan Cina dan Rusia masih menjalin kerjasama dengan Iran. Impor minyak Cina dari Iran mencapai 12 persen dari total kebutuhan minyak di dalam negeri. Cina juga berinvestasi di Iran terkait bidang energi dan Cina juga mendapatkan jaminan dari Iran yang menjamin keamanan pasokan gas ke Cina selama 25 tahun yang dimulai sejak tahun 2004 (Nugroho, 2012). Rusia juga hampir sama dengan Cina, berinvestasi di bidang energi dengan Iran, terlebih sejak pemerintahan Khatami (1997-2005) Rusia telah mengirimkan sejumlah teknologi dan tenaga ahli dalam membangun reaktor nuklir yang berada di Busheher. Sehingga Cina dan Rusia yang juga memiliki hak veto dalam DK PBB juga berkontribusi dalam menjaga pemerintahan Iran, contohnya pada akhir tahun 2005 ketika rancangan resolusi DK PBB hendak disetujui, kedua negara tersebut mengajukan amandemen atas rancangan resolusi yang ada sehingga hampir separuh dari rancangan itu direvisi. Poin penting dari revisi

adalah bahwa masing-masing negara boleh memutuskan sendiri barang-barang yang dapat dibeli dari Iran tanpa ada intervensi dari negara lain. Dari sekian sanksi yang diberikan, negara P5+1 tetap memiliki kepentingan terhadap nuklir Iran. Maka dari itu negara P5+1 mengusulkan untuk mengadakan perundingan mengenai program nuklir Iran dan tentu saja masa depan hubungan diplomatik dengan negara Mullah tersebut (Fadly, 2013)

### **C. Pembahasan Garis Besar isi *Joint Comprehensive Plan of Action***

Perundingan nuklir Iran dengan kelompok P5+1, yaitu lima negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina) plus Jerman serta Komisaris Tinggi Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa akhirnya menemukan titik final setelah negosiasi yang panjang. Kesepakatan mengenai program nuklir Iran dicapai di Vienna, Austria, Selasa 14 Juli 2015 untuk mengatasi kecurigaan Barat terhadap program yang dinyatakan Iran bertujuan damai tersebut, dan dengan demikian sanksi terhadap Iran dicabut.

Sebagaimana yang telah ditetapkan, kesepakatan ini ditetapkan dengan komitmen yang mengindahkan “garis merah” yang telah ditentukan Iran. Dengan poin-poin penting dalam kesepakatan itu sebagai berikut;

1. Negara-negara besar mengakui program nuklir tujuan damai Iran serta mengharga hak nuklir bangsa Iran dalam kerangka undang-undang dan konvensi internasional.
2. Program nuklir Iran yang semula didistorsi sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia diluruskan menjadi obyek kerjasama Iran dengan khalayak internasional sesuai standar internasional.

3. PBB mengakui Iran sebagai negara berkekuatan nuklir tujuan damai, termasuk di bidang daur ulang bahan bakar nuklir dan pengayaan uranium.
4. Telah terjadi perubahan fundamental dalam pola interaksi DK PBB dengan Iran setelah keluarnya resolusi DK PBB di bawah pasal 25 Piagam PBB, sembari mengingat pasal 41 dan terutama lagi pasal-pasal berkenaan dengan pencabutan sanksi sebelumnya terhadap Iran.
5. Semua fasilitas nuklir Iran tetap beroperasi, dan tak ada satupun yang dihentikan ataupun dibekukan sebagaimana yang diinginkan sebelumnya oleh pihak lawan runding Iran.
6. Pengayaan uranium Iran tetap dilanjutkan, dan demikian keinginan untuk menghentikan pengayaan uranium tidak terpenuhi.
7. Fasilitas infrastruktur nuklir Iran tetap dipertahankan, dan tidak ada satupun sentrifugal yang disingkirkan. Aktivitas penelitian dan pengembangan semua sentrifugal utama dan mutakhir tetap dilanjutkan, termasuk R-4, IR-5, IR-6, dan IR-8.
8. Instalasi nuklir Arak untuk produksi air berat tetap dipertahankan dan terus dikembangkan serta ditambah dengan perlengkapan, teknologi, ujicoba dan instalasi terkini melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki teknologi mutakhir di bidang ini. Tuntutan sebelumnya untuk mengubah instalasi nuklir Arak dengan air ringan tidak terpenuhi.
9. Iran sebagai salah satu produsen bahan bakar nuklir, terutama uranium yang diperkaya dan air berat, akan mengakses pasar internasional. Dengan demikian maka sanksi dan pembatasan terhadap ekspor dan impor bahan bakar nuklir yang sebagian di antaranya sudah berjalan selama 35 tahun menjadi tidak berpengaruh.

10. Cadangan uranium yang diperkaya Iran akan dipangkas sampai 89% yaitu dari total 10.000kg menjadi 300kg.
11. Selain itu Iran juga akan mengurangi 2/3 sentrifugal yang telah berhasil dioperasikan selama ini, namun juga menjadi inti bom nuklir, atau 6.104 dari total 19.000 pemusing uranium.
12. Pengurangan akan uranium ini akan berjalan hingga dalam jangka waktu selama 15 tahun ke depan. Kemudian seterusnya Iran juga bersedia selama 15 tahun kedepan untuk tidak melakukan pengayaan atau menumpuk persediaan uraniumnya. Iran berjanji untuk tidak memperkaya uraniumnya hingga melebihi 3,67%. Disamping itu pula selama 15 tahun ini, Iran juga tidak akan melakukan pembangunan terhadap fasilitas-fasilitas pengayaan uraniumnya kembali
13. Semua embargo ekonomi, finansial, perbankan, migas, petrokimia, perdagangan, suplai dan transportasi yang diterapkan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai sanksi atas program nuklir Iran akhirnya dicabut sekaligus.
14. Tuntutan penghentian program rudal Iran, khususnya balistik, dikendurkan menjadi pembatasan terhadap kebijakan Iran berkenaan dengan rudal-rudal yang dapat membawa hulu ledak nuklir.
15. Embargo senjata terhadap Iran dicabut dan diganti dengan beberapa ketentuan pembatasan. Iran diperkenankan mengimpor ataupun mengeksport sebagian produk persenjataan.
16. Sanksi berkenaan dengan bahan berfungsi ganda dicabut, dan dengan demikian kebutuhan Iran di bidang ini akan dipenuhi melalui komisi bersama Iran dan P5+1.
17. Mahasiswa Iran tidak lagi dikenai sanksi akademik di bidang-bidang sains yang berhubungan dengan energi nuklir.

18. Embargo pesawat sipil yang sudah berjalan tiga dekade dicabut, dan dengan demikian Iran juga dapat mengakses suku cadang untuk upgrade hingga memenuhi standar keamanan.
19. Pencairan aset keuangan Iran di luar negeri sebesar milyar dolar Amerika Serikat yang telah dibekukan dan diblokir selama beberapa tahun terakhir akibat sanksi.
20. Bank Central Iran, perusahaan pelayaran, perusahaan minyak nasional, perusahaan transportasi minyak dan perusahaan-perusahaan lain yang bernaung di bawahnya, maskapai penerbangan Iran, dan banyak lembaga dan instansi perbankan (sekitar 800 orang dan perusahaan) dinyatakan keluar dari daftar sanksi.
21. Iran mendapat peluang lebih besar untuk andil di pasar dan sektor-sektor perdagangan, teknologi, keuangan dan energi.
22. Pembatasan kerjasama ekonomi Iran di semua bidang, termasuk investasi di sektor industri migas dan petromikian, dicabut.

Terbuka peluang kerjasama luas semua pihak dengan Iran di level internasional di sektor energi nuklir tujuan damai serta pembangunan pembangkit listrik, reaktor untuk riset dan penyediaan teknologi nuklir terkini. Perjanjian nuklir Iran terutama dibentuk menjadi tiga bagian. Yang pertama, bagaimana membatasi kapasitas nuklir Iran; yang lain topik yang sangat penting akan bagaimana menghapus sanksi yang telah dijatuhkan terhadap Iran oleh masyarakat internasional, khususnya Barat; topik terakhir yang juga sangat penting, akan bagaimana untuk memastikan bahwa Iran mematuhi kesepakatan, agar program nuklir Iran pada akhirnya tidak akan berpaling ke arah militer.

Sudah sepuluh tahun berlalu, tapi masalah nuklir Iran masih belum terselesaikan. Meskipun Amerika Serikat dan Iran bersedia untuk memecahkan kebuntuan sepanjang waktu. Namun belakangan mungkin masalah nuklir Iran

benar-benar bisa mencapai titik balik sejarah. Karena pada putaran perundingan sekarang melalui JCPOA, Amerika Serikat dan Iran telah melakukan konsesi besar (Kompasiana, 2017).

Tanggung jawab terpenting Komisi Bersama adalah penyelesaian perselisihan, yang dapat dipicu oleh anggota Komisi Bersama manapun yang percaya bahwa komitmen berdasarkan JCPOA tidak terpenuhi. Mekanisme penyelesaian sengketa tersebut mencakup proses 35 hari untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk rujukan ke Menteri Luar Negeri Iran dan P5+1 dan pembentukan Broad Advisory untuk memberikan pendapat yang tidak mengikat kepada Komisi Bersama. Jika langkah-langkah ini gagal menyelesaikan perselisihan, anggota Komisi Gabungan manapun dapat merujuk masalah tersebut ke Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan, sesuai dengan prosedurnya, kemudian diminta untuk memberikan suara pada sebuah resolusi untuk melanjutkan bantuan sanksi. Dengan prosedur ini, setiap anggota tetap dapat memveto kelanjutan bantuan sanksi, yang bertentangan dengan prosedur yang mewajibkan konsensus anggota tetap untuk menjatuhkan sanksi. Jika Dewan Keamanan PBB gagal mengeluarkan resolusi dalam 30 hari, semua sanksi berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB sebelumnya akan diterapkan kembali. Ketentuan untuk pengenaan sanksi langsung sanksi PBB secara otomatis akan berakhir setelah 10 tahun, walaupun pejabat Amerika Serikat mengatakan ada kesepakatan politik antara P5 +1 untuk menjatuhkan sanksi PBB dalam tahun 11-15 jika Iran melanggar kesepakatan tersebut (Samore, 2015).



Tabel 3.1. Timeline Pengimplementasian JCPOA :

14 Juli 2015	“Finalization Day” : Pengumuman kesepakatan nuklir dengan Iran
Pertengahan Juli 2015	Pengumuman kesepakatan nuklir dengan Iran. Pertengahan Juli, 2015 Persetujuan diajukan ke Dewan Keamanan PBB dan dikodifikasikan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB yang baru, yang berlaku dalam 90 hari.
Pertengahan Oktober 2015	“Adoption Day” : 90 hari setelah Resolusi Dewan Keamanan PBB disahkan, kesepakatan secara formal mulai berlaku. Iran diminta untuk menyediakan akses ke IAEA untuk menyelesaikan kemungkinan Isu Dimensi Militer.
Tidak terikat pada tanggal tertentu	“Implementation Day” : *Tidak terikat pada tanggal tertentu. Setelah verifikasi IAEA bahwa Iran telah menyelesaikan langkah-langkah nuklir utama, sanksi sanksi diberlakukan.
8 tahun setelah Hari Adopsi	“Transition Day” : Meringankan sanksi tambahan, termasuk embargo senjata Uni Eropa. AS akan mempertimbangkan untuk segera memberhentikan sanksi sebelumnya yang ditunda.
10 tahun setelah Hari Adopsi	“Termination Day” : Resolusi Dewan Keamanan PBB dihentikan dan berkas Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa ditutup.

Berdasarkan perjanjian tersebut juga, Iran setuju untuk menghilangkan persediaan uranium-medium yang telah diperkaya, memotong persediaan uranium yang telah diperkaya hingga 98% dan mengurangi sekitar 2/3 jumlah sentrifugal untuk setidaknya untuk 15 tahun. Selama 15 tahun ke depan, Iran juga sepakat untuk tidak memperkaya uranium lebih dari 3,67% atau membangun fasilitas memperkaya uranium heavy-water (air berat) baru. Kegiatan memperkaya uranium akan dibatasi hanya terbatas dengan fasilitas tunggal dengan menggunakan sentrifuse umum pertama selama sepuluh tahun. Fasilitas lain akan dikonversi untuk menghindari resiko proliferasi. Untuk memantau dan memverifikasi kepatuhan Iran dengan perjanjian tersebut. IAEA atau Badan Energi Atom Internasional akan diberi akses rutin ke semua fasilitas nuklir Iran (Kompasiana, 2017).